

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era modern saat ini, tuntutan atas informasi keuangan semakin meningkat. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk lebih ahli dalam pengolahan laporan keuangan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat luas. Situasi tersebut menimbulkan banyak kendala dalam kebanyakan suatu organisasi, terutama organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba lebih rentan terhadap permasalahan ini, karena minimnya sumber daya yang ahli di bidang ini (Resalawati, 2012).

Karakteristik dan tujuan organisasi, organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, dengan menjadikan sumber daya manusia sebagai asset paling berharga. Karena semua aktivitas pada organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia (Resalawati, 2012).

Peranan akuntansi dalam segi pengelolaan keuangan sebuah organisasi pun semakin disadari oleh berbagai pihak, baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun non – laba (nirlaba). Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan. Walaupun organisasi semacam ini tidak mencari laba, namun mereka tetap berurusan dengan soal-soal keuangan karena mereka mempunyai anggaran, membayar tenaga kerja, membayar listrik dan sewa, serta urusan-urusan keuangan lainnya. Disamping itu terdapat karakteristik khusus organisasi

nirlaba dalam memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya (Andasari, 2016).

Menurut (IAI, 2012) organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan. Karakteristik khusus ini menimbulkan jenis transaksi, siklus operasi, pola pengelolaan keuangan, perlakuan akuntansi dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya

Di zaman modern ini transparansi dan akuntabilitas merupakan harapan setiap pengguna laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mengerti kondisi dari perusahaan pengguna laporan keuangan dan akuntabel pengguna laporan keuangan juga dapat ikut serta dalam mengawasi kinerja perusahaan sehingga bisa meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Praktik akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga nirlaba lainnya merupakan sesuatu yang tidak lazim. Organisasi nirlaba sendiri sebagai wujud dari organisasi masyarakat yang berangkat dari masyarakat dan kembali pada masyarakat diuntut untuk menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Rustiarini, 2016).

Masjid merupakan salah satu contoh dari organisasi nirlaba. Seperti halnya organisasi laba, organisasi nirlaba juga membutuhkan ilmu akuntansi untuk mencatat pengeluaran dan pendapatannya. Guna memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada masyarakat maka Masjid juga

dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada (Andarsari, 2016).

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dana masjid dengan akurat dibutuhkan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan (Fitriani, 2006).

Akuntansi dibutuhkan oleh masjid untuk menghasilkan informasi keuangan yang tepat guna meningkatkan mutu dari masjid itu sendiri. Keterbukaan masalah laporan keuangan masjid sangatlah penting untuk membangun kepercayaan pada umat dan para donator masjid untuk bisa mempertanggungjawabkan keuangan masjid yang jelas, dan dapat meningkatkan kepercayaan donator yang telah memberikan amalannya untuk pengelolaan masjid. Dampak dari laporan keuangan yang tidak transparan akan membuat kecurigaan pada para jama'ah (Munir, 2018).

Tuntutan akan akuntabilitas yang memadai untuk organisasi nirlaba khususnya Masjid bukanlah hal yang mudah. Seringkali Bendahara Masjid adalah seseorang yang tidak punya pengalaman dalam bidang akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dibuat bendahara cenderung apa adanya hanya menjelaskan pemasukan serta pengeluaran dari masjid itu sendiri, tanpa

menimbang dari aspek – aspek akuntansi yang berlaku khususnya pada organisasi nirlaba dalam PSAK 45 (Badu, 2014).

Sifat dan sumber pendanaan organisasi masjid yaitu dari infaq dan shodaqoh di sektor nirlaba bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efektif. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan lembaga nirlaba, antara lain: bagaimana mengelola pendanaan untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang disepakati dengan pihak donator, juga bagaimana lembaga nirlaba ini dapat menyisihkan sebagian dananya untuk membayar berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, tagihan dan sebagainya (Sugiyono, 2016).

Melalui media, pada tanggal 18 juli 2018 telah terjadi penggelapan dana infaq sebesar 266 juta, terhitung dari Maret 2014 sampai Maret 2017 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada masjid Al – Ghuroba pakuwon mall Surabaya. (sumber dari artikel yang diterbitkan iNews.id JATIM pada tanggal 18 Juli 2018 dengan judul berita “Tilap Uang Rp266 Juta, Bendahara Masjid di Surabaya Divonis 2,6 Tahun” yang diakses pada tanggal 10 april 2019)

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN PSAK NO.45 PADA LAPORAN KEUANGAN MASJID AL - MUBARRAK SIDOARJO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka dibuat suatu perumusan masalah yaitu:

“Bagaimana Penerapan PSAK NO.45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Masjid AL – Mubarrak”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan pada Masjid Al - Mubarrak Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Pengelolaan manajemen keuangan yang baik, dengan melakukan pencatatan keuangan, maka bermanfaat untuk organisasi keagamaan dengan harapan bisa di gunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan yang akan datang

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu akuntansi terutama pada aspek pengelolaan manajemen keuangan dan pencatatan keuangan dalam organisasi keagamaan.

3. Manfaat Akademis

Menambah pengetahuan mengenai pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba khususnya pelaporan keuangan organisasi masjid dan sebagai tambahan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.